



**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020**



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR **94** TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 91);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019;

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

Bab V : Penutup.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renja Sekretariat Daerah;
 - b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Renja Inspektorat Daerah;
 - d. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Renja Badan Daerah;
 - f. Renja Dinas Daerah; dan
 - g. Renja Kecamatan.
- (2) Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - e. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Renja Dinas Kesehatan;
 - c. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- d. Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kunda Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - e. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perdagangan;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Dinas Pariwisata.
- (4) Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pemetaan nomenklatur program kegiatan merupakan proses penyelarasan terhadap program dan kegiatan dalam perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemetaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BANTUL,



SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

AE. KECAMATAN PAJANGAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Pajangan menyusun Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021.

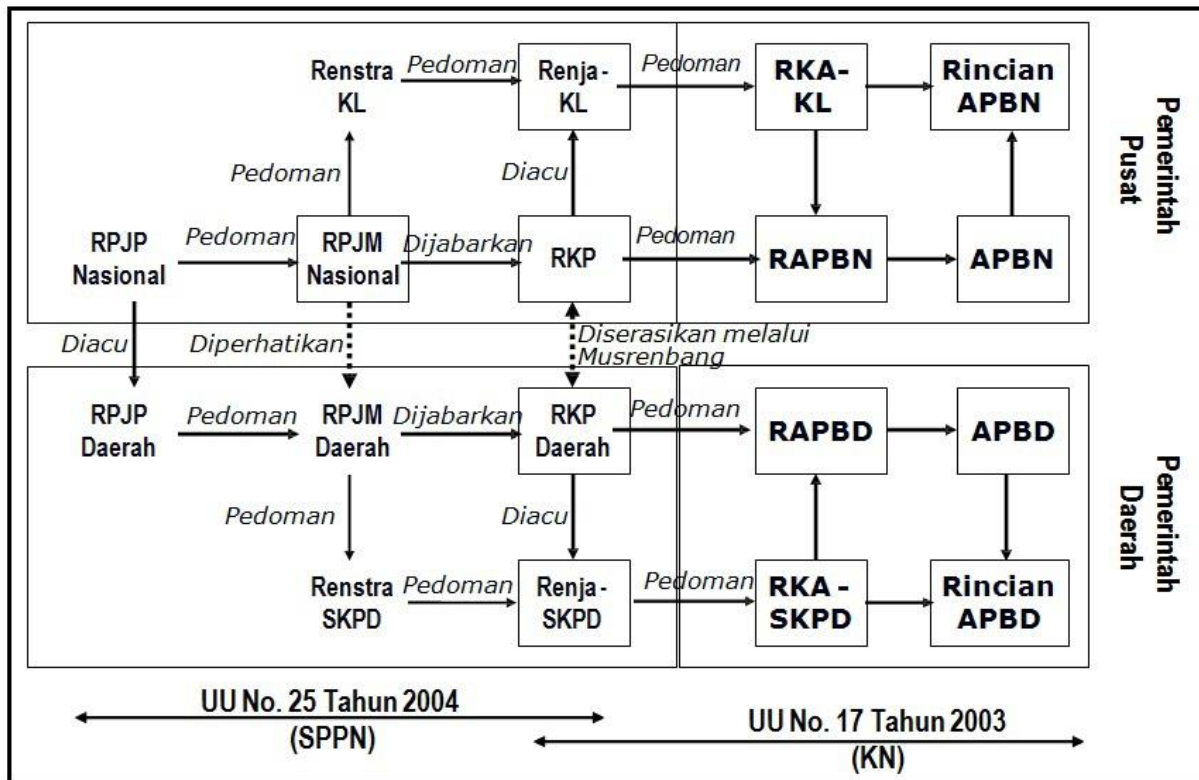
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul; dan
- i. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Pajangan dalam penyusunan RKA Kecamatan Pajangan Tahun 2021. Adapun tujuan disusunnya Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Kecamatan Pajangan Tahun 2021 yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.
HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten bantul Tahun 2019.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP	83	79.43	96%	80	80	100%
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Meningkatnya capaian nilai AKIP	83	79.43	96%	80	80	
		Publikasi	-	-	-	10 buah	10 buah	100%
		Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob	60 ob	100%	60 ob	60 ob	100%
		Belanja alat listrik dan elektronik	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
		Jumlah Materai	750 Lbr	750 Lbr	100%	750 Lbr	750 Lbr	100%
		Belanja surat kabar	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
		Belanja Penggandaan	30665 lbr	30665 Lbr	100%	31811 lbr	31811 lbr	100%
		Pembayaran Listrik	12 bln	12 bln	100%	12 bln	12 bln	100%
		Belanja alat dan bahan pembersih	12 paket	12 paket	100%	20 jenis	20 jenis	100%
		Belanja ATK	12 paket	12 paket	100%	42 jenis	42 jenis	100%
		Pembayaran Honor PNS	60 ob	60 ob	100%	96 ob	96 ob	100%
		Belanja cetak	8 jenis	8 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
		Perpanjangan STNK	5 unit	5 unit	100%	6 unit	6 unit	100%
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pemeliharaan kendaraan dinas kecamatan	5 unit	5 unit	100			
		Operasional kendaraan dinas	12 bln	12 bln	100			
		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
		Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 2	-	-	-	6 unit	6 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Meningkatnya cakupan pemenuhan sarpras aparatur						
		Pemeliharaan komputer, printer, AC, almari,meja kerja, mesin ketik	16 unit	16 unit	100	16 unit	16 unit	100%
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	95	89.38	94%	95	95	100%
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Meningkatnya Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	95	89.38	94	95	95	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	12 bln	12 bln				
		Dokumen perencanaan	-	-	-	5 dok	5 dok	100%
		Dokumen keu dan aset	-	-	-	37 dok	37 dok	100%
		Dokumen evaluasi	-	-	-	7 dok	7 dok	100%
		Dokumen kepeg dan ketatausahaan	-	-	-	2 dok	2 dok	100%
36	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	Cakupan Pembinaan pemerintahan umum	95	95	100%	100	100	100%
	Pengendalian keamanan lingkungan	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum						
		Terselenggaranya workshop keamanan	1 lap	1 lap	100	-	-	
		Terselenggaranya patroli keamanan	10 lap	10 lap	100	-	-	
		Laporan koordinasi keamanan	-	-	-	4 lap	4 lap	100%
		Laporan partisipasi pelaksanaan TMMD	-	-	-	3 lap	3 lap	100%
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	
		Pemantauan unas/uas	20 lokasi	20 lap	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Pelaksanaan Pengajian syawalan	1 lap	1 lap	100	-	-	-
		Kegiatan Paskibraka	1 lap	1 lap	100	-	-	-
		Pengiriman bregodo kecamatan	1 lap	1 lap	100	-	-	-
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa	4 lap	4 lap	100	-	-	-
	Rapat koordinasi unsur Muspika	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum				-	-	-
		Pelaksanaan Rakor Muspika	4 lap	4 lap	100	-	-	-
	Pelaksanaan Rakorpem desa	Meningkatnya Cakupan Pembinaan pemerintahan umum	2 lap	2 lap	100	-	-	-
		Terlaksananya Pelaksanaan Rakorpem desa	2 lap	2 lap	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
		Partisipasi dalam turnamen olahraga kabupaten	2 lap	2 lap	100	-	-	
		Pelaksanaan senam bersama	2 lap	2 lap	100	-	-	
		Laporan pembinaan bidang pendidikan	-	-	-	3 lap	3 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	14 lap	14 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	2 lap	2 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	1 lap	1 lap	100%
		Laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	18 lap	18 lap	100%
35	Program peningkatan pelayanan masyarakat	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	95.36	105.96	100	100	100%
	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Meningkatnya Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)				1 lap	1	100
		Sosialisasi Pelayanan kependudukan	1 lap	1 lap	100	-	-	
						-	-	
	Peningkatan pelayanan masyarakat	Meningkatnya Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)				-	-	
		Terlaksananya rakor PATEN	4 lap	4 lap	100	-	-	
		Jenis layanan yang diberikan	-	-	-	19 jenis	19 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan	Target dan Realisasi Tahun 2019			Target dan Perkiraan Realisasi Tahun 2020		
			Target Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)	Target Kinerja Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Kinerja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8) = (7)/(6)	(9)	(10)	(11) = (10)/(9)
	Pendampingan kegiatan TMMD	Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat						
		Terlaksananya pengiriman anggota linmas pada kegiatan TMMD	2 lap	2 lap	100	-	-	-
	Pemberdayaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Hasil pemutakhiran Data Kemiskinan						
		Jumlah rapat koordinasi pemberdayaan TKPK dalam pemutakhiran data kemiskinan	5 lap	5 lap	100	-	-	-
	Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat						
		Pemantauan Gertak PSN, DB4MK	10 lap	10 lap	100	-	-	-
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah	3 lap	3 lap	100	-	-	-
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan						
		Kegiatan Promosi Produk masyarakat	-	-	-	1 lap	1 lap	100%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2019, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah:

Tabel 2.1

Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebabnya

No	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penyebab
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan	Adanya efisiensi anggaran terhadap pengeluaran rutin.
	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Efisiensi terhadap pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.
2	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Terdapat kegiatan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan yang disusun.

2. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
1.	Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintah	
	Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan	Barang mudah didapat
	Kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	Terdapat beberapa penyedia jasa pemeliharaan.
	Kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor	Tersedianya beberapa rekanan pemeliharaan gedung kantor
	Kegiatan pemeliharaan	Terencana sesuai kebutuhan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
	kendaraan dinas/operasional	dan keperluan.
2.	Program Pembinaan Pemerintahan Umum	
	Pengendalian keamanan lingkungan	Koordinasi intensif bidang keamanan Tk. Kecamatan
	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kemajuan teknologi dan komunikasi
	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kesadaran dan rasa cinta tanah air yang besar
	Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa	Terbentuknya Tim Sahabat APBDES
	Rapat koordinasi unsur muspika	Dukungan anggaran yang memadai
	Pelaksanaan rakorpem desa	Kesadaran menyamakan visi dan misi pembangunan desa
	Musrenbang tingkat kecamatan	Adanya agenda persiapan pelaksanaan musrenbang
3.	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan	
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	
	Pengembangan produk unggulan kecamatan	Adanya tempat untuk dapat menunjukkan / mengenalkan produk unggulan kecamatan yaitu Bantul Expo, peran serta pelaku UMKM
	Pembinaan organisasi perempuan	Peran serta PKK Kec, Desa, Dusun, Dharma wanita kecamatan dan Perwosi kecamatan.
	Pemberdayaan petani	Antusiasme petani dalam pelatihan pembuatan pupuk organik
	Pendampingan kegiatan TMMD	Aktifnya peranan anggota Linmas
	Pemberdayaan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan	Sinerginya kegiatan kecamatan dengan tim
	Pendampingan pengelolaan Lingkungan Hidup	Kesadaran pentingnya kelestarian lingkungan hidup

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
5.	Program peningkatan pelayanan masyarakat	
	Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Tersedianya sarana pelayanan yang memadahi dan nyaman
	Kegiatan peningkatan pelayanan masyarakat	Tersedianya SOP pelayanan dan media informasi pelayanan kecamatan

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1, dan Tabel 2.2, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2021 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penguatan kapasitas SDM dan Kelembagaan berbasis IT dan Kinerja;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait, sebagai upaya menyusun perencanaan kegiatan yang tepat dan akurat;
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan memberikan informasi PATEN melalui media cetak, elektronik dan social;
4. Meningkatkan koordinasi wilayah dalam upaya mengembangkan potensi ekonomi local;
5. Meningkatkan koordinasi hal ketentraman dan ketertiban, terkait pembangunan kewilayahan yang berdampak pada gesekan kepentingan;
6. Meningkatkan peran serta swasta, atau sumber dana lain yang dapat diakses dalam upaya peningkatan pembangunan masyarakat;
7. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bersama seluruh Tim kecamatan dalam upaya menciptakan masyarakat sehat, cerdas dan sejahtera;
8. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, baik secara horizontal dan vertical dalam memproyeksikan program dan kegiatan, sehingga bersinergi sampai dengan tingkat desa, terkait hasil yang dituju.

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Secara lebih rinci, capaian IKU Kecamatan Pajangan disajikan pada table berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja			Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Target Kinerja			Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1.	IKM Kecamatan	83	85	87.42	90	95.36	90	90	90	
2.	Persentase Desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	70	70	83	95	95	90	95	100	
3.	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	70	75	83.33	88	88	88	90	90	
4.	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	70	83.33	90	85	90	95	95	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kecamatan Pajangan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pajangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2019, dapat diketahui bahwa:

1. IKU Kecamatan Pajangan yang tidak memenuhi target adalah Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan. IKU tersebut tidak dapat memenuhi target disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang, Kecamatan sekedar memfasilitasi terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan, dimana dalam pelaksanaan realisasi prioritas usulan kegiatan hasil musrenbang, dilaksanakan oleh OPD Pemerintah Kabupaten Bantul berdasar tupoksi masing-masing. Sehingga Kecamatan tidak dapat mengendalikan terhadap usulan prioritas musrenbang yang telah disepakati.
 - b. Keterbatasan dana/anggaran pada OPD pengampu sesuai tugas pokok dan fungsinya terhadap banyaknya usulan pembangunan dari desa.
 - c. Belum sinerginya program kegiatan pembangunan OPD di wilayah kecamatan dengan usulan pembangunan yang diajukan desa.
 - d. Perubahan skala proiritas pembangunan terhadap kebutuhan baru yang bersifat mendesak.
2. IKU Kecamatan Pajangan yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. IKM Kecamatan
 - b. Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu.
 - c. Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDesIKU "*IKM Kecamatan*" dapat melebihi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Kompetensi petugas pelayanan yang memadai dan pengetahuan masyarakat terhadap alur pelayanan yang dibutuhkan.

- b. Pelayanan informasi public pelayanan dalam media elektronik maupun media komunikasi lain berbasis IT.
- c. Penanganan terhadap layanan aduan sesuai SOP.
- d. Tersedianya sarana prasarana pendukung pelayanan, yang memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.

IKU "*Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu*" dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan intensitas pendampingan dan monitoring ke desa-desa
- b. Menyusun Tim Sahabat Apbdes

IKU "*Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes*" dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pelaksanakan pendampingan secara intensif dengan disertai monitoring terhadap capaian penyusunan APBDes dan pencermatan terhadap kesesuaian RPJMDes.
- b. Peningkatan kegiatan rakorpem desa untuk menyatukan persepsi pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan APBDes.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Kecamatan Pajangan Tahun 2019 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada Tahun 2021 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan fasilitas pelayanan masyarakat, baik kompetensi SDM maupun sarana dan prasarana, dalam upaya tercapainya pelayanan prima.
2. Meningkatkan pelayanan informasi public dan pengembangan system pelayanan masyarakat berbasis IT sebagai upaya memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi maupun pelayanan yang diperlukan.
3. Mengoptimalkan kinerja Tim Sahabat APBDes dalam melaksanakan pendampingan dan monitoring ke desa-desa sebagai bentuk pembelajaran peningkatan kapasitas dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa.

4. Meningkatkan Kegiatan Rakorpem Desa dengan melaksanakan koordinasi, membuka konsultasi, melaksanakan pendampingan dan monitoring, dalam upaya menyelaraskan APBDes dengan RPJMDes.
5. Mengoptimalkan kegiatan Pra Musrenbang, sebagai media dalam menyelaraskan program pembangunan yang diajukan oleh desa dengan anggaran dan prioritas pembangunan yang diampu oleh OPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan Pajangan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Fungsi Lainnya. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2019, Kecamatan Pajangan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut:

Tabel 2.5

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Permasalahan	Hambatan
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan pelayanan	1. Ketidaktahuan atau ketidaksabaran masyarakat dalam melalui prosedur yang telah ditentukan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai perencanaan	2. Keterbatasan personil dan kurangnya pencermatan terhadap perencanaan yang telah ditetapkan
3. Tidak tersedianya data kemiskinan yang termutakhirkan dan terintegrasi	3. Perbedaan persepsi dalam menentukan tolok ukur kategori miskin
4. Kurang berdayanya lembaga desa dalam mengatasi permasalahan keuangan, keamanan, lingkungan, sosial, politik, agama dan budaya.	4. Keterbatasan wewenang camat hanya pada koordinasi dan fasilitasi
5. Kurangnya peran swasta dalam pembangunan masyarakat	5. Kurangnya komunikasi intensif kepada perusahaan swasta di wilayah Pajangan

Selain itu, selama Tahun 2019, Kecamatan Pajangan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2019

Peluang	Tantangan
1. Pembangunan Bandara YIA di Kulonprogo	Menyediakan homestay di lokasi desa wisata/daerah wisata
2. Pembangunan kewilayahan, seperti : Bendung Kamijoro, UIN dan Taman Budaya (dalam rencana).	Mengkondisikan terjadinya gesekan kepentingan dalam proses pembangunan, serta mengubah persepsi masyarakat Pajangan sehingga

	tidak hanya sebagai penonton ditengah pembangunan daerahnya.
3. Potensi pengembangan dan pemasaran produk kerajinan dan olahan pangan	Melaksanakan inovasi unik terhadap motif, tampilan, rasa dan cara promosi
4. Potensi pengembangan wisata alam, buatan, sejarah dan budaya	Menyajikan suatu yang khas sebagai kenangan wisatawan
5. Berdomisilinya beberapa perusahaan swasta	Dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Pajangan

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2019, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kecamatan Pajangan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengentasan Kemiskinan dalam pemutahiran data, yang diharapkan angka kemiskinan dapat turun secara signifikan.
2. Koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Peningkatan kapasitas SDM dan Sarpras dalam menunjang pelayanan masyarakat dan fungsi lainnya
4. Pemberdayaan dan pengembangan potensi kecamatan
5. Pendampingan, koordinasi dan konsultasi pengelolaan Pemerintah Desa
6. Koordinasi dan fasilitasi sinergitas pembangunan kewilayahan.
7. Koordinasi dan fasilitasi bidang pendidikan, kesehatan, social, kebudayaan dan keagamaan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pajangan Tahun 2021. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pajangan	Nilai AKIP	75	359,034,633	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Pajangan	Nilai AKIP	75	359,034,633	
	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang	72 ob	222,034,633	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang	72 ob	222,034,633	
			Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob				Pembayaran Honor Pegawai Kontrak	60 ob		
			Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	50 jenis				Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor	50 jenis		
			Pemenuhann kebutuhan alat - alat listrik dan elektrnik	20 jenis				Pemenuhann kebutuhan alat - alat listrik dan elektrnik	20 jenis		
			Pemenuhan kebutuhan materai	750 lembar				Pemenuhan kebutuhan materai	750 lembar		
			Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	22 jenis				Pemenuhan kebutuhan alat dan bahan kebersihan	22 jenis		
			Pembayaran tagihan telepon	12 bulan				Pembayaran tagihan telepon	12 bulan		
			Pembayaran tagihan listrik	12 bulan				Pembayaran tagihan listrik	12 bulan		
			Pembayaran Langganan surat kabar	12 bulan				Pembayaran Langganan surat kabar	12 bulan		
			Pembayaran publikasi	1 jenis				Pembayaran publikasi	1 jenis		
			Pembayarn premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	60 ob				Pembayarn premi asuransi kesehatan pegawai kontrak	60 ob		
			Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	8 unit				Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	8 unit		
			Pemenuhan kebutuhan barang cetak	10000 jenis				Pemenuhan kebutuhan barang cetak	10000 jenis		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemenuhan penggandaan	30000 lembar				Pemenuhan penggandaan	30000 lembar		
	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	3600 laporan	137,000,000	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		Jumlah makan dan minum rapat	3600 laporan	137,000,000	
			Perjalanan dinas dalam daerah	198 op				Perjalanan dinas dalam daerah	198 op		
			Perjalanan dinas luar daerah	40 op				Perjalanan dinas luar daerah	40 op		
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	225,064,285	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	95	225,064,285	
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan personal komputer	2 unit	43,500,000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan personal komputer	2 unit	43,500,000	
			pengadaan AC	1 unit				pengadaan AC	1 unit		
			pengadaan printer	1 unit				pengadaan printer	1 unit		
			pengadaan rak rak arsip	1 unit				pengadaan rak rak arsip	1 unit		
	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		kebutuhan bahan baku bangunan	45 jenis	55,864,285	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		kebutuhan bahan baku bangunan	45 jenis	55,864,285	
			pembayaran upah tukang	90 oh				pembayaran upah tukang	90 oh		
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		belanja BBM operasional	8100 liter	112,700,000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		belanja BBM operasional	8100 liter	112,700,000	
			jasa servis	8 unit				jasa servis	8 unit		
			Penggantian suku cadang	8 unit				Penggantian suku cadang	8 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	16 unit	13,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		jumlah kebutuhan servis peralatan dan mesin kantor	16 unit	13,000,000	
III	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	0	3,543,369	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	0	3,543,369	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		penyusunan laporan capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	12 dokumen	3,543,369	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		penyusunan laporan capaian kinerja keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	12 dokumen	3,543,369	
IV	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	13,246,000	Program peningkatan pelayanan masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	13,246,000	
	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah rapat koordinasi	4 laporan	13,246,000	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jumlah rapat koordinasi	4 laporan	13,246,000	
V	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	0	230,332,000	Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan		cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	0	230,332,000	
	Peningkatan wawasan kebangsaan		Rakor Muspika	4 laporan	209,000,000	Peningkatan wawasan kebangsaan		Rakor Muspika	4 laporan	209,000,000	
								Kegiatan Paskibra Kecamatan			
	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Rakor keamanan	4 laporan	8,000,000	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		Rakor keamanan	4 laporan	8,000,000	
			Pengiriman Anggta linmas ke TMMD	60 ok				Partisipasi dalam Kegiatan TMMD	60 ok		
Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Rapat Pendampingan Pengelolaan APBDes	1 laporan	13,332,000	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Jumlah Rapat Pendampingan Pengelolaan APBDes	1 laporan	13,332,000		
		Jumlah Rakorpem Desa	1 laporan				Jumlah Rakorpem Desa	1 laporan			
VI	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	0	36,998,000	Program pembinaan sosial kemasyarakatan kecamatan		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	0	36,998,000	
	Pembinaan sosial budaya dan		Rakor PKK Kecamatan	10 laporan	36,998,000	Pembinaan sosial budaya dan		Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	10 laporan	36,998,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	keagamaan		Pemantauan UAS/UNAS SD/SMP/SMA/SMK	20 laporan		keagamaan		Pelaksanaan senam bersama	20 laporan		
			Pelaksanaan senam bersama	2 laporan				Pengiriman atlet ke turnamen olah raga	2 laporan		
			Pengiriman atlet ke turnamen olah raga	100 ok				Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab.	100 ok		
			Pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kab.	2 laporan				Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk kab	2 laporan		
			Pengiriman Kelompok kesenian budaya ke festival tk kab	4 laporan					4 laporan		
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	0	83,500,000	Program Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	0	83,500,000	
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Rakor TKPK	4 laporan	70,000,000	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Rakor TKPK	4 laporan	70,000,000	
			Rakor PKK Kecamatan	10 laporan				Rakor PKK Kecamatan	10 laporan		
			Partisipasi dalam Bantul Expo	1 kali				Partisipasi dalam Bantul Expo	1 kali		
			Pemberdayaan Petani	3 laporan				Pemberdayaan Petani	3 laporan		
			Pelaksanaan gertak PSN dan DB4MK	21 laporan				Pelaksanaan gertak PSN dan DB4MK	21 laporan		
						Rakor Lingkungan Hidup					
Musyawahar Perencanaan Pembangunan		Pelaksanaan musrenbang Kecaatan	1 dokumen	13,500,000	Musyawahar Perencanaan Pembangunan		Pelaksanaan musrenbang Kecaatan	1 dokumen	13,500,000		

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2021, Tema Pembangunan Nasional mengalami penyesuaian dengan adanya Pandemi Covid-19. Tema RKP Tahun 2021 sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas". Dengan adanya pandemi Covid-19, tema RKP Tahun 2021 disesuaikan menjadi "Mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial" dengan 4 fokus pembangunan nasional dan mencakup 7 agenda pembangunan nasional.

Fokus pembangunan nasional merupakan penajaman terhadap tema RKP Tahun 2021. Fokus pembangunan nasional Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan agenda pembangunan nasional mengacu pada 7 agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sehingga pada RKP Tahun 2021, ditetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- PN 2: Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- PN 3: SDM berkualitas dan berdaya saing
- PN 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- PN 5: Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- PN 6: Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- PN 7: Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Berdasarkan 4 fokus pembangunan nasional RKP Tahun 2021, maka dilakukan penekanan pada 4 PN yaitu PN 1, PN 3, PN 5 dan PN 6.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Selaras dengan pembangunan nasional, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 mengalami penyesuaian dengan

adanya pandemi Covid-19. Penyesuaian tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Penyesuaian Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021

	Sebelum Pandemi Covid-19	Sesudah Ada Pandemi Covid-19
Tema	Penguatan SDM dan Pemantapan Infrastruktur untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berkualitas	Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Prioritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. 2. Pusat pertumbuhan ekonomi. 3. Percepatan pembangunan infrastuktur strategis. 4. Pemantapan <i>smart services</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Manajemen Pemulihan Ekonomi dan Sosial serta Penguatan Infrastruktur dengan Memperhatikan Protokol Kesehatan 2. Peningkatan Sistem Kesehatan 3. Peningkatan Sistem Pendidikan 4. Manajemen Bencana 5. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Publik

Selain itu, pada RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ditetapkan pula tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Namun, dengan adanya pandemic Covid-19 dilakukan penyesuaian terhadap target tolok ukur sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
1. Mewujudkan tata kelola	Terwujudnya penyelenggaraan	Indeks Tata Kelola	8,5 (baik)	8,5 (baik)

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021		
			Semula	Penyesuaian	
pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	pemerintahan daerah yang berkualitas	Pemerintahan (<i>Indonesia Governance Index/IGI</i>)			
2. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi	Umur Harapan Hidup	73,70 tahun	73,70 tahun	
	Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Angka Harapan Lama Sekolah	15,54 tahun	15,30 tahun	
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Turunnya jumlah masyarakat kurang mampu	Angka Kemiskinan	8,32 persen	12,51 persen	
	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	5,6 persen	4,43 persen	
		Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio)	0,37	0,37	
	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisata	24 persen	24 persen	
	Terciptanya industri kreatif yang berkualitas	Cakupan industri kreatif	50 persen	50 persen	
	Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	0,1030 persen	0,1030 persen	
			Pertumbuhan produksi tanaman hortikultural	1,125 persen	1,125 persen
			Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	0,35 persen	0,35 persen
			Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	1 persen	1 persen

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target 2021	
			Semula	Penyesuaian
	Terpenuhinya kebutuhan perikanan masyarakat	Pertumbuhan produksi perikanan	1,50 persen	1,50 persen
4. Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terpenuhinya sarana prasarana publik dan prasarana dasar masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	78	78
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72	72
	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Desa Tangguh Bencana	52 desa	52 desa
	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80 persen	75 persen
5. Mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka Kriminalitas	0,060 persen	0,060 persen
6. Mewujudkan budaya sebagai identitas spesifik daerah	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan	75	70

Dengan memperhatikan tema, prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pajangan serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan Tahun 2016-2021, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021 dengan target sasaran Renja Tahun 2021 yang telah disesuaikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pajangan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2021	
				Semula	Penyesuaian
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	IKM Kecamatan	90 %	90 %
2.	Menjaga daya dukung alam dan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan	Terciptanya kesadaran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	100 %	100 %
			Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	90 %	90 %
			Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	100 %	60 %

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Kecamatan Pajangan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pajangan

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
040119	KECAMATAN PAJANGAN				834.781.521,00
04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				834.781.521,00
0407	FUNGSI LAINNYA				834.781.521,00
0407.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Nilai AKIP	85 Angka	351.280.000,00
0407.040119.01.036	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran		honor pengelola keu, BMD dan Kepeg	96 orang bulan	212.150.000,00
			honor pegawai kontrak	60 orang bulan	
			pembayaran rekening listrik	12 bulan	
			pembayaran rekening telepon	12 bulan	
			Jenis bahan bacaan surat kabar	12 bulan	
			alat tulis kantor	1633 buah	
			komponen instalasi listrik	126 buah	
			materai	710 lembar	
			bahan dan alat kebersihan	390 buah	
			publikasi	5 buah	
			Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	7 unit	
			barang cetak	236 buah	
			penggandaan	32800 lembar	
			premi asuransi	60 orang bulan	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
0407.040119.01.037	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		laporan rapat rapat	30 dokumen	139.130.000,00
			laporan pelaksanaan kegiatan	30 dokumen	
			jumlah perjalanan dinas dalam daerah	254 op	
			Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7 perjalanan	
0407.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen	175.651.521,00
0407.040119.02.051	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		Pengadaan peralatan dan perlengkapan	5 Jenis	23.200.000,00
0407.040119.02.052	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor		Pemeliharaan gedung kantor	3 unit	47.000.000,00
0407.040119.02.053	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	6 unit	95.451.521,00
			pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	1 unit	
0407.040119.02.054	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	22 unit	10.000.000,00
0407.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	80 Angka	4.000.000,00
0407.040119.06.017	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan		Dokumen perencanaan	5 Dokumen	4.000.000,00
			Dokumen keuangan dan aset	37 Dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			Dokumen evaluasi	7 Dokumen	
			Dokumen kepegawaian dan ketatausahaan	2 Dokumen	
0407.35	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Angka	12.615.000,00
0407.040119.35.002	Peningkatan pelayanan masyarakat		Jenis layanan yang diberikan	19 jenis	12.615.000,00
			masyarakat yang dilayani	5000 orang	
0407.36	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM KECAMATAN		Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan	100 Persen	189.545.000,00
0407.040119.36.015	Peningkatan wawasan kebangsaan		Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12 dokumen	172.735.000,00
			laporan Rakor Muspika	2 dokumen	
0407.040119.36.016	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana		laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4 dokumen	7.200.000,00
			Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2 dokumen	
0407.040119.36.017	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan		Laporan kegiatan rakorpem Desa	1 dokumen	9.610.000,00
			laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4 dokumen	
0407.37	PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL KEMASYARAKATAN KECAMATAN		Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	90 Persen	48.672.000,00
0407.040119.37.017	Pembinaan sosial budaya dan keagamaan		laporan kegiatan bidang pendidikan	2 dokumen	38.872.000,00
			laporan kegiatan bidang kesehatan	10 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
			Tolok Ukur	Target	
			laporan kegiatan bidang kebudayaan	4 Dokumen	
			laporan kegiatan bidang keagamaan	2 dokumen	
			laporan kegiatan bidang sosial	15 dokumen	
0407.040119.37.018	Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	Kecamatan Pajangan	Laporan Rakor Penanggulangan Kemiskinan	4 dokumen	9.800.000,00
0407.48	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TINGKAT KECAMATAN		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan	90 Persen	53.018.000,00
0407.040119.48.010	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat		Laporan kegiatan promosi produk unggulan masyarakat	1 Dokumen	35.070.000,00
			laporan rakor persiapan lomba desa	1 dokumen	
			laporan rakor TTG	1 dokumen	
			laporan bimtek lingkungan hidup	1 dokumen	
			laporan bimtek pemberdayaan petani	1 dokumen	
0407.040119.48.011	Musyawarah Perencanaan Pembangunan		dokumen pelaksanaan musrenbang	2 dokumen	17.948.000,00

BAB V.
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2021. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, Kepala Daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.


BUPATI BANTUL,
[Handwritten Signature]
SUHARSONO

LAMPIRAN

HASIL PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

KECAMATAN PAJANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
PEMETAAN PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2021

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN			PAGU	
			No	Indikator Keluaran	Target		Satuan
Kecamatan Pajangan						834.781.521,00	
	KECAMATAN					303.850.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					22.225.000,00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					9.610.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pengendalian Tata Kelola Pemerintahan	1	Laporan kegiatan rakorpem Desa	1	dokumen	9.610.000,00
			2	laporan kegiatan pendampingan pengelolaan keu Desa	4	dokumen	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					12.615.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Peningkatan pelayanan masyarakat	1	Jenis layanan yang diberikan	19	jenis	12.615.000,00
			2	masyarakat yang dilayani	5000	orang	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					101.690.000,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					101.690.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1	dokumen pelaksanaan musrenbang	2	dokumen	17.948.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	1	Laporan kegiatan promosi produk unggulan masyarakat	1	Dokumen	35.070.000,00
			2	laporan rakor persiapan lomba desa	1	dokumen	
			3	laporan rakor TTG	1	dokumen	
			4	laporan bimtek lingkungan hidup	1	dokumen	
			5	laporan bimtek pemberdayaan petani	1	dokumen	
		Pembinaan sosial budaya dan keagamaan	1	laporan kegiatan bidang kesehatan	10	dokumen	38.872.000,00
			2	laporan kegiatan bidang kebudayaan	2	Dokumen	
			3	laporan kegiatan bidang keagamaan	2	dokumen	
			4	laporan kegiatan bidang sosial	2	dokumen	
		Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan	1	Laporan Rakor Penanggulangan Kemiskinan	4	dokumen	9.800.000,00
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					7.200.000,00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					7.200.000,00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Penanggulangan Bencana	1	laporan rakor bidang keamanan lingkungan dan penanggulangan bencana	4	dokumen	7.200.000,00
			2	Laporan Hasil Pengiriman TMMD	2	dokumen	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					172.735.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					172.735.000,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan wawasan kebangsaan	1	Laporan pelaksanaan upacara 17 an dan hari besar nasional	12	dokumen	172.735.000,00
			2	laporan Rakor Muspika	2	dokumen	
	URUSAN UMUM					530.931.521,00	

PERANGKAT DAERAH	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN BARU	KEGIATAN LAMA	OUTPUT KEGIATAN				PAGU
			No	Indikator Keluaran	Target	Satuan	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						530.931.521,00
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.000.000,00
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen perencanaan	2	Dokumen	4.000.000,00
	Administrasi Keuangan						3.645.000,00
	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Dokumen keuangan dan aset	37	Dokumen	3.645.000,00
	Administrasi Umum						523.286.521,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	materai	710	lembar	3.000.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	pembayaran rekening listrik	12	bulan	32.700.000,00
			2	pembayaran rekening telepon	12	bulan	
			3	peningkatan daya listrik	1	paket	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Pembayaran pengurusan STNK kendaraan dinas	7	unit	2.400.000,00
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honor pengelola keu, BMD dan Kepeg	96	orang bulan	14.580.000,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	honor pegawai kontrak	60	orang bulan	112.387.200,00
			2	premi asuransi	60	orang bulan	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1	pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	22	unit	10.000.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	alat tulis kantor	1633	buah	23.623.150,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	publikasi	5	buah	12.390.000,00
			2	barang cetak	236	buah	
			3	penggandaan	32800	lembar	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	komponen instalasi listrik	126	buah	2.896.450,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	bahan dan alat kebersihan	390	buah	7.333.200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	1	Jenis bahan bacaan surat kabar	12	bulan	840.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	laporan rapat rapat	30	dokumen	57.840.000,00
			2	laporan pelaksanaan kegiatan	30	dokumen	
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	1	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	7	perjalanan	81.290.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	6	Jenis	25.200.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	1	Pemeliharaan gedung kantor	3	unit	41.355.000,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1	pemeliharaan kendaraan dinas roda dua	5	unit	95.451.521,00
			2	pemeliharaan kendaraan dinas roda empat	1	unit	